

MODEL ADAPTASI EKOLOGIS DAN STRATEGI NAFKAH PADA MASYARAKAT SEKITAR TAMAN NASIONAL GUNUNG HALIMUN SALAK**MODEL OF ECOLOGICAL ADAPTATION AND COPING STRATEGY OF COMMUNITY AROUND HALIMUN SALAK MOUNTAIN NATIONAL PARK****R Rahmawati^{1,a}, G Pratidina¹, dan Muarif²**

¹Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Djuanda Bogor, Jl. Tol Ciawi 1 Kotak Pos Ciawi 35, Bogor 16720

²Jurusan Perikanan Fakultas Agribisnis dan Teknologi Pangan Universitas Djuanda Bogor Jl. Tol Ciawi 1 Kotak Pos Ciawi 35, Bogor 16720

^aKorespondensi: Rita Rahmawati, E-mail: rita.rahmawati@unida.ac.id, ritafirdaus@yahoo.co.id
(Diterima oleh Dewan Redaksi: 18-06-2011)
(Disetujui oleh Dewan Redaksi: 25-09-2011)

ABSTRACT

This research revealed an ecological adaptation and coping strategy of local community under conflict context between the community and government and the research took conflict case between local community and Halimun Salak Mountain National Park. Ultimate goal of the research was to recognize many factors affected community coping strategy and to design ecological adaptation model allowed community livelihood under wellbeing and maintained sustainable environment. Model of ecological adaptation and coping strategy formulated in the first year completed in the second year by including forest management policy and sustainable education. The model implemented with action research through natural resource management and livelihood environmental education for the local community and hopefully, the model will become an important media in positioning the local community in a significant role of forest manager and superintendent.

Key words: ecological adaptation, coping strategy, resource conflict, forest state transformation, local community.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji adaptasi ekologis dan strategi nafkah masyarakat lokal dalam konteks konflik antara masyarakat dan Pemerintah, dengan mengambil kasus Konflik antara Masyarakat Lokal dengan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS). Tujuan akhir dari penelitian adalah diketahuinya berbagai faktor yang mempengaruhi strategi nafkah masyarakat dan merancang model adaptasi ekologis yang memungkinkan masyarakat hidup dalam kesejahteraan dan lingkungan tetap lestari. Model adaptasi ekologis dan strategi nafkah yang sudah dirumuskan di tahun pertama diperbaiki di tahun kedua dengan memasukkan unsur kebijakan pengelolaan hutan dan pendidikan berkelanjutan. Model tersebut diimplementasikan dengan menggunakan metode *action research*, melalui kegiatan pendidikan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup bagi masyarakat lokal yang diharapkan dapat menjadi media penting dalam menempatkan masyarakat lokal pada bagian penting unsur pengelola dan pelestari hutan.

Kata kunci: adaptasi ekologis, strategi nafkah, konflik sumber daya, perubahan status hutan, masyarakat lokal.

PENDAHULUAN

Sepanjang sejarah menunjukkan bahwa strategi nafkah penduduk mempunyai pola-pola berbeda dipengaruhi oleh budaya dan perubahan sosial. (Bellwood 2005). Dalam kasus di Indonesia, perubahan budaya dan sosial terjadi seiring dengan adanya modernisasi yaitu masuknya pengetahuan baru dan beradaptasi dengan pengetahuan yang sudah dianut masyarakat secara bertahap-tahun.

Bahkan dalam kasus perubahan masyarakat lokal (*indigineous peoples*), perubahan dilakukan untuk merespon kebijakan pemerintah, misalnya dalam konteks masyarakat yang hidup di sekitar hutan. Dikeluarkannya kebijakan pemerintah pusat mengenai pengelolaan kawasan hutan yang tadinya bersifat *open access* menjadi kawasan lindung atau taman nasional telah berimplikasi terjadinya konflik antara pemerintah dan masyarakat lokal. Contohnya konflik antara masyarakat Kasepuhan dengan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS). Konflik tersebut telah membuat moral ekonomi petani berubah. Sebagian melakukan perlawanan dengan menyandarkan hidup (nafkah) pada pemanfaatan hutan secara tidak bertanggung jawab (*illegal logging*) dan sebagian lagi secara rasional membuat pilihan nafkah lain untuk mengatasi kesulitan ekonomi (kemiskinan) yang timbul akibat kebijakan pemerintah pusat.

Bagaimanapun, konflik tersebut telah menyebabkan guncangan yang cukup hebat bagi masyarakat, di satu sisi telah menyebabkan terjadinya deforestasi sementara di sisi lain telah menyebabkan meningkatnya kemiskinan, perubahan nafkah, perubahan kelembagaan, norma dan budaya hingga tatanan kependudukan. Pertanyaannya kemudian model adaptasi ekologis dan strategi nafkah seperti apa yang cocok dijalankan oleh masyarakat lokal dalam merespon perubahan, khususnya untuk tipe masyarakat lokal yang memiliki kelembagaan lokal yang khas seperti masyarakat Kasepuhan.

MATERI DAN METODE

Penelitian ini dilakukan selama dua tahun, dengan membandingkan dua lokasi yang berbeda, yaitu desa adat (Kasepuhan), dan desa yang tidak memiliki adat khas (Non Kasepuhan),

dengan menggunakan paradigma partisipatoris (Denzin dan Lincoln 2000). Dalam metodologinya, paradigma ini menggunakan metode partisipasi *action research*.

Pengumpulan data dilakukan melalui *indepth interview*, FGD, lokakarya, diinventarisasi dalam catatan harian (*log book*). Metode untuk uji coba model menggunakan *action research*. Metode untuk evaluasi menggunakan survey, dimana kuesioner menjadi instrumen utama untuk melakukan evaluasi. Data yang dikumpulkan dianalisa melalui pendekatan kualitatif. Analisa kualitatif dilakukan terhadap data tentang strategi adaptasi ekologis dan strategi nafkah serta implikasinya terhadap pengentasan kemiskinan.

Model adaptasi ekologis dan strategi nafkah baru yang berpihak kepada kesejahteraan manusia dan kelestarian alam yang telah dirumuskan pada tahun pertama kemudian diimplementasikan di lokasi sekitar Taman Nasional Gunung Halimun Salak di tahun keua, yaitu pada masyarakat adat Kasepuhan melalui *action research*, selanjutnya di akhir tahun dievaluasi melalui survey dengan instrumen penelitian berupa kuesioner.

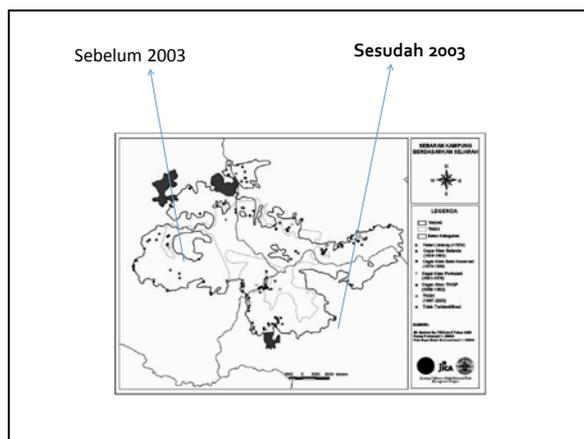
HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Adaptasi dan Strategi Nafkah Masyarakat

Kebijakan pemerintah, konflik, bencana alam, kepadatan penduduk, kerusakan hutan, musim, teknologi, kepemilikan sumberdaya alam, kemampuan/kesempatan ekonomi dan gaya hidup (kebudayaan) merupakan faktor-faktor yang secara umum biasa mempengaruhi pendapatan masyarakat (Rahmawati *et al.* 2011).

Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah yang dimaksud adalah perluasan taman nasional berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor 175/Kpts-II/2003 Tentang Penunjukan Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Lindung, Hutan Produksi Tetap, Hutan Produksi dan Kelompok Hutan Gunung Salak Seluas 113.357 Hektare di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten Menjadi Taman Nasional Gunung Halimun-Salak.



Gambar 1. Peta perubahan kawasan Taman Nasional sebelum dan sesudah 2003.

Tabel 1 Perubahan di Taman Nasional Gunung Halimun Salak

	Sebelum 2003	Sesudah 2003
Name	Halimun Mountain national Park	Halimun Salak Mountain National Park
Wide Settlement	40.000 hectare There were about 314 villages with 99.782 people in the region and around the area of TNGHS. People utilize forest for farming	113.357 hectare Prohibited for settlement, farming in forest area
Mining	There are some mining (gold and geothermal)	Prohibited for mining activities
Over Function (Take Over)	Protected forest area, forest production, and limited production forest that were previously managed by Perum perhutani (National Forest Company)	Take Over into National Park, through Forestry Ministerial Decree Number 75/Kpts-II/2003, June 10, 2003, concerning the appointment of the Halimun Salak Mountain national Park

Perubahan status wilayah tersebut membawa implikasi pada perubahan berbagai hal seperti tercantum pada Tabel 1. Secara umum tanggapan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah ini cukup beragam. Masyarakat di Kabupaten Bogor dan Lebak menerima kebijakan pemerintah tersebut. Hal tersebut disebabkan karena masyarakat di Kabupaten Bogor dan Lebak bertempat tinggal di kawasan enclafe TNGHS yang secara hukum diijinkan untuk melakukan aktivitas bertani, namun dilarang untuk beberapa aktivitas seperti menambang emas, menebang pohon dan berburu.

Lain halnya dengan masyarakat di Kabupaten Sukabumi, kebijakan tersebut telah menimbulkan terjadinya konflik, karena mereka membutuhkan kawasan TNGHS untuk bercocok tanam di ladang dan mengambil kayu di hutan untuk bahan bangunan dan kayu bakar.

Konflik

Konflik terjadi pada masyarakat di kawasan TNGHS, baik di Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, maupun Kabupaten Lebak. Di Kabupaten Bogor konflik terjadi antara masyarakat dengan TNGHS, dan antara masyarakat dengan perkebunan, di kabupaten Sukabumi konflik terjadi antara masyarakat dengan TNGHS, dan di kabupaten Lebak konflik terjadi antara masyarakat dengan Jagawana.

Konflik antara masyarakat dengan TNGHS dan jagawana disebabkan oleh *illegal logging* dan pertambangan emas tanpa ijin. Konflik masalah *illegal logging* terjadi di ketiga Kabupaten, sedangkan konflik pertambangan emas tanpa ijin hanya terjadi di Kabupaten Lebak. Konflik masyarakat dengan perkebunan terjadi di Kabupaten Bogor. Konflik ini disebabkan sengketa penggunaan lahan. Strategi adaptasi masyarakat terhadap konflik tersebut antara lain dengan beralih profesi menjadi pedagang warung, montir bengkel, tukang ojek dan bekerja menjadi kuli pertambangan.

Konflik pada masyarakat kasepuhan dipengaruhi karena masalah hutan, dimana hutan yang secara legal merupakan milik Negara dalam bentuk Taman Nasional juga diakui sebagai milik adat masyarakat Kasepuhan. Masyarakat mengatur hutan didasarkan pada pengetahuan lokal tentang zonasi, yaitu zona inti (*leuweung tutupan*), zona hutan (*leuweung titipan*), zona cadangan (*leuweung*

cawisan) dan zona pemanfaatan (*leuweung garapan*). Mereka memiliki aturan yang memungkinkan atau larangan untuk melakukan aktivitas di kawasan hutan.

Namun, pemerintah juga mengakui bahwa hutan ini adalah hutan negara. Sebelum tahun 2003 hutan ini terdiri dari hutan produksi dan taman nasional. Hutan produksi terletak di zona pemanfaatan hutan masyarakat Kasepuhan. Masyarakat Kasepuhan dan perusahaan pemerintah memanfaatkan daerah ini bersama-sama. Perusahaan Pemerintah menanam kayu tanaman, sedangkan masyarakat kasepuhan menggunakan daerah ini sebagai tanah pertanian. Setelah tahun 2003, semua hutan ini menjadi taman nasional. Tidak ada lagi hutan produksi. Oleh karena itu tidak ada lagi pengelolaan hutan sebagai garapan masyarakat. Sejak itu, maka masyarakat Kasepuhan kehilangan berbagai macam hak, antara lain hak akses, hak pengelolaan dan pemanfaatan hutan.

Bencana Alam

Di Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Lebak pernah terjadi bencana alam yang berdampak terhadap mata pencaharian masyarakat. Di Kabupaten Sukabumi pernah terjadi tanah longsor, kebakaran, angin kencang merusak sawah, dan hama babi menyerang tanaman penduduk. Di Kabupaten Lebak terjadi tanah longsor dan banjir. Hampir seluruh bencana alam tersebut terjadi sebagai dampak sekunder dari kerusakan hutan. Kerusakan hutan menyebabkan kurangnya penahan air sehingga menyebabkan longsor dan banjir, serta kurangnya penahan angin menyebabkan angin besar yang bersifat merusak tanaman dan kurangnya habitat satwa yang menyebabkan hama babi hutan.

Adaptasi nafkah terhadap bencana alam berarti melakukan upaya agar bencana tersebut berkurang. Aktivitas yang telah dilakukan masyarakat adalah kerja bakti gotong royong mengusir hama babi, membuat *terasering* penahan longsor, dan gotong royong mengatasi banjir.

Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk cenderung akan terus meningkat seiring pertambahan jumlah penduduk dengan luas lahan yang tetap. Peningkatan kepadatan penduduk sudah pasti akan menuntut adanya tempat tinggal baru sehingga akan mempersempit lahan, dan pada

beberapa daerah akhirnya lahan pertanian dikonversi menjadi lahan pemukiman. Pertambahan penduduk pada prinsipnya terjadi di kawasan TNGHS pada tiga Kabupaten. Di lokasi penelitian Kabupaten Bogor sekalipun terjadi pertambahan penduduk akan tetapi tidak menambah lahan tempat tinggal. Hal ini disebabkan wilayah pemukiman telah ditetapkan daya dukungnya untuk 30 kepala keluarga, sehingga dibatasi hanya 30 rumah.

Di Kawasan TNGHS Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Lebak peningkatan kepadatan penduduk terjadi akibat angka kelahiran dan perpindahan penduduk ke desa tersebut. Di Kabupaten Sukabumi yang memiliki pola hidup sebagai masyarakat adat kasepuhan membuat pendatang juga beradaptasi mengikuti pola hidup tersebut. Dengan bertambahnya jumlah penduduk maka diupayakan adanya peningkatan hasil panen, sehingga mampu memenuhi kebutuhan bersama.

Pengaruh Musim

Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun dan Salak (TNGHS) sebagai wilayah yang berada di Indonesia memiliki dua musim sepanjang tahun, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Masyarakat sekitar TNGHS merasakan pengaruh musim yang tidak menentu (perubahan iklim). Musim penghujan yang lebih lama dari biasanya memberikan dampak kurang baik terhadap produksi usahanya, yaitu penurunan hasil panen.

Upaya mengatasi musim ini dilakukan dengan beberapa metode. Masyarakat sekitar TNGHS di Kabupaten Bogor mengatasi dengan mengatur jadwal tanam. Di kabupaten Sukabumi masyarakat sekitar TNGHS juga menerapkan pola tanam sesuai musim dan menanam tanaman selain padi. Sedangkan di Kabupaten Lebak masyarakat mengatasi musim penghujan dengan memperbaiki saluran air.

Kemampuan (Kesempatan Ekonomi)

Peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat apabila masyarakat dapat memanfaatkan dengan baik kemampuan/kesempatan ekonomi yang dimilikinya. Kemampuan/kesempatan ekonomi yang terdapat pada masyarakat di sekitar kawasan TNGHS antara lain keberadaan waktu luang, keberadaan keahlian untuk melakukan pekerjaan sesuai potensi lokasi, atau adanya peluang usaha sesuai dengan kemampuan ekonomi.

Pemanfaatan kemampuan/kesempatan ekonomi oleh masyarakat di sekitar kawasan TNGHS di ketiga Kabupaten memiliki persamaan dan perbedaan. Di Kabupaten Bogor, masyarakat sekitar TNGHS memanfaatkannya dalam bentuk menjadi pemandu wisata, berdagang (warung), membuka *homestay* untuk wisatawan, bekerja ke kota, anggota keluarga bekerja menjadi buruh perkebunan (pemetik teh) dan mengajar pengajian anak-anak. Masyarakat kawasan TNGHS di Kabupaten Lebak mengembangkan wirausaha, menambang emas, menanam pisang dan menjadi buruh untuk memanfaatkan waktu luang yang dimiliki mereka. Masyarakat di Kabupaten Sukabumi memiliki kesamaan dengan masyarakat di Kabupaten Bogor, yaitu berdagang dan mengerahkan seluruh anggota keluarga untuk bekerja.

Gaya Hidup

Gaya hidup asli masyarakat pedesaan adalah *religious* dan sederhana (tidak konsumtif). Keberadaan media informasi baik media elektronik maupun media cetak, serta interaksi yang terbuka dengan masyarakat kota bahkan orang asing telah mempengaruhi gaya hidup masyarakat pedesaan. Karakteristik gaya hidup masyarakat di sekitar lokasi TNGHS tengah mengalami pergeseran ke arah pola kehidupan masyarakat modern. Di Wilayah Kabupaten Sukabumi yang memiliki pola masyarakat Adat Kasepuhan, masyarakat masih menyatakan terikat dengan norma adat, akan tetapi media informasi dan kemajuan teknologi seperti penggunaan *handphone* dan bantuan kompor gas mulai menggeser pola hidup ke arah lebih modern.

Di lokasi penelitian Kabupaten Bogor didapatkan anak-anak telah menggunakan *handphone* (HP) sebagai gaya hidup. *Handphone* tersebut fungsinya lebih banyak dimanfaatkan sebagai alat untuk mendengarkan musik dan foto-foto dibanding untuk komunikasi.

Di Wilayah Kabupaten Lebak peneliti menemukan pedagang warung menjual buah-buahan impor dan tidak ada sama sekali buah-buahan lokal. Penggunaan HP juga telah memasyarakat di kawasan ini. Masyarakat menyatakan pola kebudayaan modern disebabkan pengaruh para juragan penambang emas. Namun demikian sekalipun kebudayaan modern sudah masuk, pola hidup masyarakat

Kasepuhan tidak berubah dalam hal tatacara menanam padi dan kebiasaan tidak menjual hasil panen.

Adaptasi Ekologis dan Strategi Nafkah Masyarakat Sekitar TNGHS

Pada dasarnya sekalipun kondisi ekologis dan kebijakan di sekitar berubah, namun tidak terlalu banyak mempengaruhi mata pencaharian penduduk di sekitar hutan, terutama di wilayah Lebak dan Bogor. Penduduk di daerah Lebak yang bermata pencaharian sebagai petani memiliki tanah di luar kawasan Taman Nasional, namun beberapa dari penduduk juga memiliki mata pencaharian lain di dalam kawasan, khususnya di daerah penambangan emas tanpa ijin. Sekalipun wilayah ini sudah ditutup oleh Taman Nasional, namun Taman Nasional tidak cukup kuat untuk menjaga wilayah ini, sehingga masyarakat bisa dengan leluasa mengambil pasir emas, membawanya ke desa mereka, dan diproses (pencucian) di halaman rumah masing-masing. Tanpa rasa takut masyarakat meletakkan pasir yang diduga berisi emas tertumpuk di jalan atau di depan rumah penduduk masing-masing.

Begitupun dengan wilayah Bogor, mata pencaharian mereka sepenuhnya tertumpu pada perkebunan sebagai tukang petik teh, mandor perkebunan atau penyabit rumput di perkebunan atau pembasmi hama. Beberapa wanita yang tidak ikut bekerja di perkebunan bekerja di rumah membuka warung atau menjadi *baby sitter* menjaga anak-anak di tempat penitipan anak. Di daerah ini tidak terlalu banyak masyarakat yang bekerja sebagai petani dan menggarap lahannya sendiri. Ada masyarakat yang mencoba menggarap lahan di kawasan Taman Nasional, sejauh ini masih dibolehkan oleh Taman Nasional selama tidak ada bukaan baru.

Di daerah Sukabumi, masyarakat yang hidup disini adalah masyarakat adat kasepuhan yang memiliki sejarah keterkaitan dengan hutan secara historis. Masyarakat ini memiliki mata pencaharian utama sebagai petani padi. Umumnya masyarakat memiliki lahan di wilayah taman nasional yang dulunya wilayah Perhutani. Ketika perubahan status dari perhutani menjadi taman nasional di tahun 2003. Beberapa masyarakat kehilangan hak aksesnya untuk menggarap tanah. Namun beberapa masih tetap bertahan menggarap di lokasi taman nasional. Sejauh inipun Taman

Nasional masih membolehkan asal tidak menebang pohon kayu (keras) dan tidak membuka lahan baru. Strategi adaptasi yang dilakukan oleh masyarakat di daerah ini adalah dengan menanam tanaman selain padi yang komersial bisa dijual seperti kapolaga atau palawija, serta memberdayakan anggota keluarga seperti istri dan anak untuk turut bekerja mencari nafkah/menghasilkan pendapatan.

Pada prinsipnya sebagian besar pendapatan keluarga masih dihasilkan oleh kepala keluarga. Hal ini mengindikasikan peran kepala keluarga yang sangat penting dalam mengembangkan ekonomi keluarga. Dengan demikian salah satu upaya untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah melakukan pembinaan ibu-ibu melalui pengembangan usaha berbasis keluarga.

Dukungan Kelembagaan

Kelembagaan menjadi faktor penting dalam mendukung strategi nafkah dan adaptasi masyarakat terhadap faktor ekologis, sehingga berbagai kesulitan hidup baik yang bersumber dari aspek ekonomi maupun aspek lain dapat didukung oleh kelembagaan yang ada dan diiukti oleh masyarakat.

Adapun kelembagaan yang terdapat pada masyarakat di Kawasan TNGHS adalah kelembagaan sosial dan kelembagaan ekonomi. Kelembagaan *system social* berupa kelembagaan adat (Kasepuhan), pengajian dan PKK. Kelembagaan ekonomi berupa koperasi dan arisan.

Kelembagaan sosial berupa masyarakat adat (kasepuhan) terdapat di wilayah Kabupaten Sukabumi. Masyarakat di daerah ini mengikuti serangkaian kegiatan adat dan menerapkan *system* kehidupan adat sebagai *system social*. Oleh karena itu masyarakat menyatakan tidak berani masuk ke Hutan apabila dikatakan wilayah hutan tersebut adalah hutan larangan oleh ketua adat (abah). Masyarakat juga melakukan penanaman padi dan pemanenan mengikuti petunjuk Ketua Adat. Demikian juga masyarakat masih patuh mengikuti aturan adat dengan menyimpan hasil panen padi di lumbung padi.

Dukungan kelembagaan cukup mempengaruhi dan menentukan strategi nafkah masyarakatnya. Di kawasan Bogor, strategi nafkah relatif tetap karena ketergantungan penduduk terhadap perkebunan cukup tinggi

baik dalam hal mencari nafkah maupun penyediaan tempat tinggal. Pola nafkah dan pendapatan masyarakat di daerah ini bergantung pada perkembangan perdagangan teh global yang berpengaruh terhadap perkembangan standar upah dari perkebunan.

Pada masyarakat Lebak, sebenarnya perubahan status perhutani menjadi taman nasional tidak banyak mempengaruhi mereka, karena sejak dulu masyarakat ini sudah menghadapi masalah dengan taman nasional yaitu penambangan emas tanpa ijin. Secara ekonomi apabila diukur dari keberadaan rumah dan lingkungan pedesaan daerah ini bukanlah daerah yang miskin, walaupun masih ada beberapa penduduk miskin di wilayah ini (30%). Mata pencaharian utama sebagai petani dan mata pencaharian tambahan di penambangan emas membuat kondisi ekonomi daerah ini cukup bagus. Hanya saja kerentanan hidup sebagai penambang liar cukup membuat masyarakat ini hidup dalam ketidaknyamanan. Daerah ini hampir tidak menghadapi pola perubahan nafkah yang berarti, strategi adaptasi mereka relatif tetap dari tahun ke tahun sejak sebelum perubahan status ekologis sampai sekarang.

Berbeda dengan dua daerah lainnya, masyarakat di wilayah Kabupaten Sukabumi menghadapi dampak yang cukup besar akibat perubahan status hutan dari Perhutani menjadi Taman Nasional. Hal ini terjadi karena masyarakat di daerah ini memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap hutan. Selain karena karakteristik masyarakatnya berbeda, termasuk masyarakat adat kasepuhan, juga masyarakat ini memiliki sejarah keterkaitan terhadap hutan yang secara tradisional mengakui hutan sebagai hutan adat, yang juga secara adat masyarakat memiliki hak untuk pengelolaan hutan, dan hak itu berbenturan dengan hak yang dimiliki Negara selaku pemilik legal hutan.

Pola adaptasi ekologis dan strategi nafkah masyarakat di daerah ini masih di seputar pertanian, namun karena yang tadinya sangat bertumpu pada lahan pertanian yang ada di kawasan hutan. Masyarakat bisa secara bebas untuk menanam dan menebang pohon di lahan pertaniannya yang ada di kawasan hutan, sekarang harus menyesuaikan dan tunduk pada aturan pemerintah (Taman Nasional). Namun perjuangan mereka untuk menda-

patkan pengakuan adat dan hak akses terhadap hutan tidak pernah berhenti.

Mata pencaharian utama masyarakat Kasepuhan adalah pertanian sebagaimana dikemukakan oleh Rahmawati (2012) bahwa *The main livelihood of Kasepuhan community is farming in both the fields and paddies. Agricultural patterns of Kasepuhan community rest on a hereditary knowledge about farming methods that rely on the existence of trust in nature.*

Model adaptasi ekologis yang terjadi pada masyarakat Kasepuhan bertumpu dari local knowledge mereka tentang pertanian padi dan system keamanan pangan. Ada dua jenis petani, yaitu sebagai pemilik (petani) dan sebagai pekerja (buruh). Sebenarnya, para pekerja memiliki klaim lahan huma, tetapi lahan itu luasnya sangat kecil, hasilnya tidak mencukupi, maka mereka menjadi pekerja setelah mereka bekerja di tanah mereka. Upah sebagai pekerja diatur oleh sistem 05:01. Ini berarti bahwa pemilik mendapatkan 80% dan pekerja mendapatkan 20% dari hasil beras. Sedangkan jika membayar secara tunai, yaitu sekitar 30.000 rupiah per hari, sejak jam 08:00 sampai 15:00 WIB (Rahmawati, 2012).

Selanjutnya Rahmawati (2012) juga menjelaskan tentang konsep sistem ketahanan pangan di komunitas Kasepuhan, yaitu Ibu Bumi (bumi dianggap sebagai ibu), Bapa Langit (langit dianggap sebagai ayah) dan Guru mangsa (Waktu/mangsa adalah dianggap sebagai guru/master).

Sampai saat ini, konsep ibu bumi, bapak langit dan Guru mangsa masih digunakan oleh masyarakat Kasepuhan. Pengetahuan mereka berasal dari alam. Sekalipun lingkungan berubah dan strategi nafkah berubah, tetapi tidak merubah pola nafkah utama di sector pertanian, khususnya pertanian padi. Perubahan nafkah hanya pada perubahan strategi untuk mendapatkan tambahan nafkah, seperti memberdayakan anggota keluarga (istri dan anak), atau penambahan jenis tanaman lain di samping padi, tanaman yang dapat dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup, sementara padi masih menjadi tanaman yang terlarang untuk dijual. Padi hanya boleh untuk disimpan dan dikonsumsi.

Model Adaptasi Ekologis

Model adaptasi ekologis yang berpihak pada kesejahteraan manusia dan kelestarian alam

adalah model adaptasi masyarakat lokal yang tetap bertahan hidup dalam kesejahteraan (keluar dari kemiskinan) sekalipun ditimpa berbagai masalah ekologis baik yang bersumber dari alam (seperti bencana alam) infiltrasi teknologi dan pengetahuan modern maupun perubahan kelembagaan akibat berubahnya status hutan dari Hutan Produksi menjadi Taman Nasional yang menyebabkan hak akses masyarakat hilang dan masyarakat berada dalam kondisi konflik. Kondisi-kondisi tersebut jelas mempengaruhi mata pencaharian masyarakat (strategi nafkah masyarakat) yang menyebabkan mereka harus mencari strategi nafkah baru. Ada kalanya nafkah baru tersebut menempatkan masyarakat dalam kondisi sulit (miskin), namun karena adanya dukungan kelembagaan dan dukungan sosial (*social capital* bisa berupa konsep ketahanan pangan masyarakat) menyebabkan satu sama lain saling mendukung dan keluar dari kondisi sulit (lihat Rahmawati *et al.* 2011).

Selanjutnya Rahmawati *et al.* (2011) merumuskan model adaptasi ekologis dan strategi nafkah masyarakat sekitar Taman Nasional Gunung Halimun Salak, dimana model tersebut ditujukan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat maupun kelestarian alam/hutan. Oleh karena itu, diperlukan berbagai prasyarat kondisi yang harus dicapai untuk mendukung adaptasi ekologis masyarakat, yaitu berupa keputusan eko politik yang berpihak pada alam dan masyarakat, adanya pengelolaan kolaboratif antara taman nasional dan masyarakat, menempatkan masyarakat sebagai partner dan campur tangan pemerintah daerah untuk memberikan jalan keluar dari kemiskinan berupa program-program pengentasan kemiskinan yang terpadu dengan program pelestarian lingkungan.

Analisis Faktor Dominan yang Mempengaruhi Model Adaptasi dan Strategi Nafkah

Model adaptasi yang sudah dirumuskan pada tahun pertama (Rahmawati *et al.* 2011) telah diuji cobakan di lingkungan masyarakat Kasepuhan Kabupaten Sukabumi. Hasil Evaluasi menunjukkan ada sejumlah faktor dominan yang mempengaruhi model adaptasi dan strategi nafkah masyarakat.

Faktor Ekologis

Faktor ekologi merupakan faktor dominan yang menentukan model adaptasi dan strategi

nafkah, hal ini terkait dengan peranan dan perilaku manusia dipengaruhi oleh faktor ekologisnya. Ekologi dan Ekonomi menjadi dua hal yang saling terkait dalam menentukan adaptasi dan strategi nafkah rumah tangga dan pengelolaan rumah tangga. Namun kadangkala seolah-olah antara keduanya berada dalam dua jaringan atau sistem yang berbeda. Padahal sebenarnya rumah tangga manusia itu juga merupakan bagian, atau harus berada secara serasi dan didukung secara kesinambungan (*sustainable*) dalam dan oleh rumah tangga makhluk hidup di lingkungannya. Benturan tersebut terjadi berakar dari pengaturan tata-ruang dalam ekosistem (Soerjani 1992).

Dalam konteks Pembangunan, pelestarian hutan juga harus menempatkan masyarakat lokal sebagai pusat perhatian, dimana pembangunan tersebut memberikan keuntungan bagi semua pihak. Dalam kasus perubahan status hutan menjadi taman nasional, juga telah menyebabkan munculnya berbagai dampak negatif seperti meningkatnya kemiskinan, kelompok rentan dan pengangguran. Dalam konteks ini, masalah tersebut perlu mendapat perhatian utama karena bisa menjadi penyebab instabilitas yang akan membawa pengaruh negatif, seperti longgarnya ikatan-ikatan sosial dan melemahnya nilai-nilai serta hubungan antar manusia. Oleh karena itu, pembangunan atau perubahan tidak dapat dipandang hanya dari satu sisi saja misalnya tujuan pelestarian hutan, tetapi juga perlu adanya komitmen dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan cara-cara yang adil dan tanpa mengucualikan rakyat miskin, meningkatkan keterpaduan sosial dengan politik yang didasari hak azasi, nondiskriminasi dan memberikan perlindungan kepada mereka yang kurang beruntung.

Dukungan Sosial dan Kelembagaan

Keterlibatan masyarakat lokal, dukungan sosial dan kelembagaan menjadi faktor penting keberhasilan suatu pembangunan atau intervensi suatu perubahan. Masyarakat lokal harus menjadi pelaku utama dalam pembangunan. Oleh karena itu, membutuhkan kajian strategis tentang restrukturisasi sistem sosial pada tingkat mikro, mezzo dan makro; sehingga masyarakat lokal dapat mengembangkan potensi tanpa adanya hambatan eksternal pada struktur mezzo dan makro. Struktur mezzo yang dimaksud dapat berupa struktur pemerintah regional setingkat Kabupaten/Kota

dan Propinsi; sedangkan struktur makro dapat berupa struktur pemerintah pusat atau nasional.

Pola kebijakan yang selama ini dilaksanakan lebih kuat datang dari atas ke bawah daripada dari bawah ke atas. Kondisi tersebut mencerminkan perlu adanya pergeseran peran pemerintah, dari peran sebagai penyelenggara pelayanan sosial menjadi fasilitator, mediator, koordinator, pendidik, mobilisator, sistem pendukung dan peran-peran lain yang lebih mengarah pada pelayanan tidak langsung. Adapun peran organisasi lokal, organisasi sosial, LSM dan kelompok masyarakat lain lebih dipacu sebagai agen pelaksana perubahan dan pelaksana pelayanan sosial kepada kelompok rentan atau masyarakat pada umumnya.

Penyelesaian Konflik

Kebijakan pemerintah dalam perluasan Taman Nasional telah menyebabkan perubahan status hutan, yang tadinya bersifat open akses menjadi tidak ada akses untuk masyarakat. Kebijakan ini menjadi pemicu konflik antara masyarakat dengan pemerintah. Penyelesaian konflik hanya dapat diselesaikan apabila ada kemauan dari pihak-pihak yang terlibat konflik. Aktor utama yang terlibat konflik harus terlibat dan berperan aktif dalam proses penyelesaian. Tetapi kecenderungan konflik yang ada di Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) telah melibatkan pihak luar untuk menjembatani penyelesaian konflik tersebut, misalnya LSM AMAN.

Menurut Miall *et al.* (2000), ada beberapa faktor yang menyebabkan perlunya pihak ketiga dalam penyelesaian konflik. Pertama, sumber-sumber konflik justru lebih banyak karena faktor luar. Kedua, interdependensi global yang ada mengakibatkan perlunya pihak ketiga turut campur sebagai pencegahan agar konflik tidak meluas. Ketiga, biaya konflik berupa tragedi kemanusiaan membuat pihak luar memiliki legitimasi untuk tidak tinggal diam atau melakukan intervensi. Keempat, adanya kesepakatan dari hampir semua kajian konflik bahwa konflik yang berlarut-larut hanya dapat diselesaikan dengan melibatkan pihak luar.

Dalam konteks konflik di TNGHS, keterlibatan pihak ketiga lebih diakibatkan karena ketidak setaraan kekuasaan antara pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu LSM merasa perlu mendampingi masyarakat

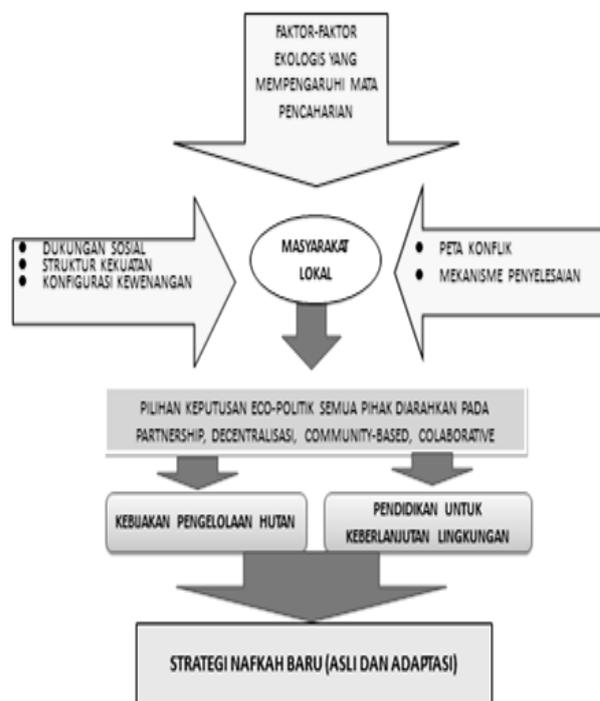
untuk memperoleh hak-hak masyarakat yang sebelumnya ada menjadi hilang akibat perluasan taman nasional. Oleh karena itu, sangatlah tidak mungkin terlalu mengandalkan Negara/ Pemerintah untuk menangani konflik internalnya sendiri karena tidak dapat disangkal, dalam konflik internal, Pemerintah biasanya menjadi instrumen dari kelompok dominan. Galtung dan Horowitz dalam Ryan (1990) menjelaskan bahwa negara bukan seorang arbiter yang mampu berdiri netral (pihak ketiga) tetapi justru menjadi bagian dari pihak yang berkonflik (pihak kedua). Perlu keterlibatan pihak ketiga untuk menyelesaikan konflik agar tidak mengancam perdamaian serta menghentikan kekerasan yang ada.

Tujuan masuknya pihak ketiga adalah mengubah situasi konflik destruktif dan menurunkan tingkat eskalasinya, mengalihkan para pelaku konflik menuju ke arah penyelesaian konflik. Peranan pihak ketiga memiliki power atau peranan yang sangat kuat sekali dalam menciptakan perdamaian (Hampson, 1997). Tetapi ia bukanlah sebuah *panacea* atau obat mujarab bagi sebuah resolusi konflik (Pruitt dan Rubin, 2004). Bisa jadi ia merupakan obat yang sangat kuat, tetapi juga memiliki efek samping yang tidak diinginkan. Obat utama untuk sembuh tentu saja dari dalam tubuh itu sendiri. Pihak ketiga hanyalah pendorong agar obat yang ada efektif.

Keputusan Ekopolitik

Pendekatan dalam ekopolitik ada dua, yaitu *actor based approach* dan *critical approach*. *Actor based approach* mengacu pada pendapatnya Bryant dan Bailey (2000) sedangkan *critical approach* mengacu pada pendapat Forsyth (2003). Dalam konteks konflik di Taman Nasional Gunung Halimun Salak, maka keputusan ekopolitik dalam penyelesaian konflik dan adaptasi masyarakat diarahkan pada *partnership*, desentralisasi, *community-based* dan *colaborative*.

Mengacu pada berbagai faktor dominan tersebut, maka penyempurnaan model adaptasi dan strategi nafkah yang berpihak kepada kesejahteraan manusia dan kelestarian alam dapat dikemukakan model adaptasi ekologis yang sudah disempurnakan (Gambar 2).



Gambar 2 Model Adaptasi Ekologis dan Strategi Nafkah di Sekitar Taman Nasional Gunung Halimun Salak yang Sudah Disempurnakan.

Gambar 2 menunjukkan bahwa ada banyak faktor yang mempengaruhi masyarakat lokal dalam beradaptasi terhadap perubahan lingkungan dan strategi nafkah baru, sampai pada penyelesaian konflik melalui keputusan ekopolitik semua pihak yang diarahkan pada *partnership*, *decentralisasi*, *community-based*, *colaborative*. Dalam hal kebijakan pengelolaan hutan dan pendidikan keberlanjutan lingkungan.

Pendidikan keberlanjutan ini dilatarbelakangi suatu pemikiran bahwa berbagai permasalahan lingkungan hidup di dunia telah banyak diketahui bersumber dari kerusakan hutan. Sebagai contoh adalah banjir, sedimentasi di daerah das dan pesisir, dan global warming. Dunia saat ini mutlak membutuhkan hutan dan kekuatan fungsinya untuk dapat mencegah kerusakan lingkungan dan dampak lanjutannya. Hutan yang mampu mencegah dampak lingkungan hidup adalah hutan yang memiliki diversitas dan fungsi yang masih baik. Keberadaan hutan dengan kesatuan fungsinya yang lestari harus dapat diwujudkan dalam model pengelolaan hutan berkelanjutan.

Model pengelolaan hutan berkelanjutan pada hakikatnya tidak hanya mengedepankan unsur ekologis semata, akan tetapi juga unsur

ekonomi dan sosial. Unsur sosial mengandung makna sebagai upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dan menciptakan kelembagaan dalam pengelolaan kawasan dan fungsi hutan.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Model adaptasi ekologis dan strategi nafkah baru yang berpihak kepada kesejahteraan manusia dan kelestarian alam, yaitu model adaptasi masyarakat lokal yang tetap bertahan hidup dalam kesejahteraan (keluar dari kemiskinan) sekalipun ditimpa berbagai masalah ekologis baik yang bersumber dari alam (seperti bencana alam) infiltrasi teknologi dan pengetahuan modern maupun perubahan kelembagaan akibat berubahnya status hutan dari hutan produksi menjadi taman nasional yang menyebabkan hak akses masyarakat hilang dan masyarakat berada dalam kondisi konflik. Kondisi-kondisi tersebut jelas mempengaruhi mata pencaharian masyarakat (strategi nafkah masyarakat) yang menyebabkan mereka harus mencari strategi nafkah baru. Ada kalanya nafkah baru tersebut menempatkan masyarakat dalam kondisi sulit (miskin), namun karena adanya dukungan kelembagaan dan dukungan sosial (*social capital* bisa berupa konsep ketahanan pangan masyarakat) menyebabkan satu sama lain saling mendukung dan keluar dari kondisi sulit. Namun demikian kondisi tersebut belum cukup untuk dapat mencapai kesejahteraan masyarakat maupun kelestarian alam/hutan.

Diperlukan berbagai prasyarat kondisi yang harus dicapai untuk mendukung adaptasi ekologis masyarakat, yaitu berupa keputusan eko politik yang berpihak pada alam dan masyarakat, adanya pengelolaan kolaboratif antara taman nasional dan masyarakat, menempatkan masyarakat sebagai partner dan campur tangan pemerintah daerah untuk memberikan jalan keluar dari kemiskinan berupa program-program pengentasan kemiskinan yang terpadu dengan program pelestarian lingkungan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (DIKTI) atas dukungan dana hibah untuk penelitian ini, Taman Nasional Gunung Halimun Salak dan

Pemerintah dan Masyarakat setempat atas izin fasilitas yang diberikan dalam kegiatan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Bellwood P. 2005. *First Farmers: The origins of agricultural societies*. USA, UK, Australia: Blackwell Publishing
- Bryant RL and Bailey S. 2000. *Third World Political Ecology*. Routledge, Taylor and Francis Group.
- Pruitt DG and Rubin JZ. 2004. *Teori Konflik Sosial*, Jakarta: Pustaka Pelajar. hlm.374
- Denzin NK dan Lincoln YS. 2000. *Handbook of Qualitative Research*. USA: Sage Publications.
- Hampson FO. 1997. Third-party role in the termination of intercommunal conflict, millenium: *Journal of International Studies*. 26(3): 749.
- Forsyth T. 2003. *Critical Political Ecology: The Politics of Environmental Science*. Routledge, London, UK.
- Miall H. 2000. *Resolusi Damai Konflik Kontemporer*. Terjemahan Tri Budhi Satrio, Jakarta, Raja Grafindo Persada. hlm. 48.
- Rahmawati R, G Pratidina, dan Muarif. 2011. Strategi Adaptasi Ekologis dan Pengentasan Kemiskinan Pada Masyarakat Sekitar Taman Nasional Gunung Halimun Salak. *Jurnal Sosial Humaniora*.
- Rahmawati R. 2012. A Study of the Kasepuhan (Sundanese) community. *International Journal on Social Science Economics & Art..* 2(3): .
- Soerjani M. 1992. *Ekologi Sebagai Dasar Pemahaman tentang Lingkungan Hidup Serasi No. 24*.
- Ryan S. 1990. *Ethnic Conflict and International Relations*, England, Dartmouth. hlm.53.